



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PONCO HARTANTO, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
JAWA TENGAH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,

(Dr. PONCO HARTANTO, S.H.,M.H.)

(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	75%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	75%
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	75%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	75%
		Nilai Kinerja Anggaran	80%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.672.556.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 22.693.380.000,-
	Jumlah	Rp. 24.365.936.000,-

**D. PRIORITAS NASIONAL**

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Brebes, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
JAWA TENGAH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,



(Dr. PONCO HARTANTO, S.H.,M.H)



(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H,M.H)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESSY ISWANDARI, S.H.  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BREBES , Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,  
  
(YADI RACHMAT SUNARYADI,  
S.H.,M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

  
(DESSY ISWANDARI, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Jumlah penyerapan % -----95----- x 100  Jumlah pengelolaan keuangan yang telah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	95%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Refomasi Birokrasi pada seluruh bidang Kejaksaan Negeri Brebes	Mengupayakan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	75%
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan  ----- x 100  Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	85%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara  -----x 100  Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	85%
			Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih</p>	
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	<p>Jumlah persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi</p> <p>-----x 100</p> <p>Jumlah satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi</p>	85%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Agung	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Agung	85%

**D. PRIORITAS NASIONAL**

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 22.693.380.000,-
	Jumlah	Rp. 22.693.380.000,-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

BREBES, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,

(YADI RACHMAT SUNARYADI,  
S.H., M.H.)



Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

(DESSY ISWANDARI, S.H)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAINAL MUTTAQIN DANAWIHARDJA, S.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BREBES, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,



(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

(ZAINAL MUTTAQIN DANAWIHARDJA, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN**  
**KEJAKSAAN NEGERI BREBES**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum  2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu  -----x 100  Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	85%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu  -----x 100  Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	85%
		Kampanye Anti Korupsi	Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan  -----x 100  Target Kegiatan Posko Intelijen	85%


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan	Rp. 40.000.000,-
2.	Kegiatan PAKEM	Rp. 58.008.000,-
3.	Kampanye Anti Korupsi	Rp. 20.000.000,-
4.	Penerangan Hukum	Rp. 38.976.000,-
5.	Penyuluhan Hukum	Rp. 52.400.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 209.384.000,-</b>

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

BREBES, Januari 2025,

Pihak Kedua,

  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,  
(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

  
(ZAINAL MUTTAQIN DANAWIHARDJA, S.H)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUGROHO TANJUNG, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

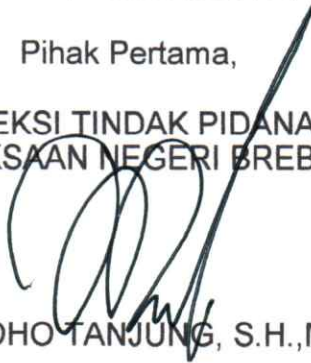
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes , Januari 2025,

Pihak Kedua,

  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,  
(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES  
(NUGROHO TANJUNG, S.H.,M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**9. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
	Berdasarkan Keadilan Restoratif		Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	95%
Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	95%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi		Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	95%	


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pra Penuntutan perkara Pidana Umum	Rp. 32.670.000,-
2.	Penuntutan perkara Pidana Umum	Rp. 580.220.000,-
3.	Eksekusi	Rp. 28.000.000,-
4.	Restorative Justice (RJ)	Rp. 7.720.000,-
5.	Pembantaran	Rp. 5.400.000,-
6.	Sidang Tilang	Rp. 9.700.000,-
Jumlah		Rp. 663.710.000,-


**10. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)


Brebes, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,  
  
(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.)



Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES  
  
(NUGROHO TANJUNG, S.H.,M.H.)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DANU TRISNAWANTO, S.H.,M.H  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BREBES, 31 Januari 2025,

Pihak Kedua,



(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

(DANU TRISNAWANTO, S.H.,M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ----- x 100 Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan  ----- x 100  Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan  ----- x 100  Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan  ----- x 100  Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan  ----- x 100  Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)  ----- x 100  Jumlah perkara tindak pidana	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	$\frac{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$	50%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak)	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan TPPU yang telah Dieksekusi	barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Tipikor tahap Penyelidikan	Rp. 92.082.000,-
2.	Tipikor tahap Penyidikan	Rp. 206.000.000,-
3.	Tipikor tahap Pratut Dan Tut	Rp. 239.900.000,-
3.	Tipikor tahap Eksekusi	Rp. 11.080.000,-
Jumlah		Rp. 549.062.000,-

**D. KINERJA TAMBAHAN**

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

BREBES, 31 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,



(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

(DANU TRISNAWANTO, S.H.,M.H)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INTAN KAFA ARBINA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BREBES, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,



(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

(INTAN KAFA ARBINA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI BREBES**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Tata Usaha Negara		Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	85%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan}} \times 100$	75%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	$\frac{\text{Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata}}{\text{Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata}} \times 100$	85%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pertimbangan Hukum	Rp. 13.200.000,-
2.	Pendampingan Hukum Dana Desa	Rp. 24.000.000,-
3.	Bantuan Hukum Litigasi	Rp. 30.000.000,-
4.	HaloJPN	Rp. 6.000.000,-
5.	Pelayanan Hukum	Rp. 7.200.000,-
Jumlah		Rp. 80.400.000,-

#### D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan HaloJPN	Jumlah kegiatan HaloJPN	85%
2.	Meningkatnya Kegiatan Pendampingan Hukum Dana Desa	Jumlah kegiatan Pendampingan Hukum Dana Desa	75%

BREBES, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,

(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H., M.H.)



Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES

(INTAN KAFA ARBINA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAN SURYAMAN, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BREBES

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Brebes, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,

KEPALA SEKSI PAPBB  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES,

(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.)

(IMAN SURYAMAN, S.H.,M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**  
**KEJAKSAAN NEGERI BREBES**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan  ----- x 100 Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan melalui Lelang, PSP, Hibah dan lainnya yang ditangani	87 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>                         Nilai Barang Rampasan, Sita Eksekusi dan Aset yang berhasil dilaksanakan Lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan asset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian / Lembaga lintas negara                          ----- x 100                          Nilai Barang Rampasan, Sita Eksekusi dan Aset hasil penelusuran dan pengamanan asset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian / Lembaga lintas negara                     </p>	95 %
			<p>                         Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian / Lembaga lintas negara                          ----- x 100                          Nilai asset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian / Lembaga lintas negara                     </p>	95 %
			<p>                         Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya                          ----- x 100                     </p>	50 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkraacht van gewijsdezaak yang masih memiliki hak tagih	

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan	Rp. 114.700.000 ,-
2	Pemusnahan	Rp. 29.300.000 ,-
3	Penyelesaian	Rp. 26.000.000 ,-
	Jumlah	Rp. 170.000.000,-

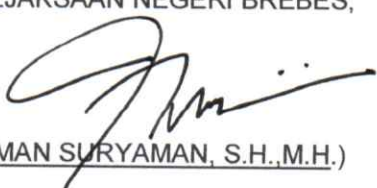
#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pihak Kedua,  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BREBES,  
  
(YADI RACHMAT SUNARYADI, S.H.,M.H.)

Brebes, Januari 2025,  
Pihak Pertama,  
KEPALA SEKSI PAPBB  
KEJAKSAAN NEGERI BREBES,  
  
(IMAN SURYAMAN, S.H.,M.H.)